

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DAMPAK GLOBALISASI DAN PERAN SOSOK KYAI DI SUMENEP
(Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kyai di Sumenep, Madura)
- A Zahid -

**FAMAJAL (Potret Tradisi Pengakuan Kekerabatan Masyarakat
Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat
Melalui Ritual Keagamaan)**
- M. Syukri Nawir, dkk. -

**TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA
AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA
PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA**
- Ach. Aziz Faiz -

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2020

Editor in Chief
Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor
M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers
Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



Daftar isi

DAMPAK GLOBALISASI

DAN PERAN SOSOK KUYAI DI SUMENEP (Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kiyai di Sumenep, Madura)

A Zahid.....141

FAMAJAL (Potret Tradisi Pengakuan Keekerabatan Masyarakat Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat Melalui Ritual Keagamaan)

M. Syukri Nawir, Muhamad Yusuf, Talabudin Umkabu,

M. Yasin. U.N. Mayalibit, Sulis Maryati159

TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA

Abd. Aziz Faiz179

PENGARUH SIKAP PROFAN TERHADAP PARADIGMA MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF EMILE DURKHEIM

Nurul Khair197

JEMAAH MAHASISWA SALAFI DI MASJID POGUNG YOGYAKARTA

Arbi Mulya Sirait.....215

RELASI ELIT LOKAL DALAM KONFLIK KEAGAMAAN DI LOMBOK BARAT

Mohamad Baihaqi235

MODERASI RELASI LINTAS AGAMA TAU SAMAWA (ORANG SUMBAWA) BERBASIS KESEHARIAN DI TANA SUMBAWA

Yaspis Edgar N. Funay255

DERADIKALISASI KAUM REMAJA DALAM MEMBENDUNG RADIKALISME MEDIA SOSIAL

Mutrofin & Ahmad Kharis273

DAMPAK GLOBALISASI DAN PERAN SOSOK KYAI DI SUMENEP (Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kyai di Sumenep, Madura)

A Zahid

IAIN Tulungagung

Azahidwaris19@gmail.com



Abstrak

Pada mulanya, masyarakat Sumenep mendefinisikan kyai sebagai sosok yang disakralkan, memiliki pengetahuan keagamaan, dan dekat dengan masyarakat awam. Definisi ini mengafirmasi bahwa sosok kyai adalah pilihan yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan ummat. Tetapi, di masyarakat Sumenep sendiri, pandangan demikian mengalami pergeseran, sosok kyai bertransformasi pada bentuk yang mungkin 360 derajat berbeda, yakni kyai yang berpolitik. Dualisme yang melekat pada sosok kyai inilah yang menjadi pertanyaan, kapan kyai menjadi sosok kyai dan kapan kyai menjadi politisi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui posisi kyai di daerah Sumenep, agar terhindar dari bias pemahan terhadap sosok kyai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kritis, sehingga antara teori dan hasil data benar-benar di analisis secara teoritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kyai di Sumenep mengalami dualisme. Hal ini terjadi lantaran dampak globalisasi yang mengubah posisi kyai dari tokoh agama menjadi seorang politisi. Sehingga, tidak heran, jika posisi kyai di daerah Sumenep mulai absurd dan sulit dibedakan kapan ia berperan sebagai kyai, dan kapan ia menjadi politisi. Sehingga berimbas pada pola pemahaman masyarakat Sumenep terhadap kyai yang memiliki posisi sebagai politisi.

Kata kunci: kyai, agen-struktur, globalisasi

Abstract

Previously, the Sumenep community defined the Islamic cleric as a sacred figure, possessing religious knowledge, and being close to the lay community. This definition agrees that the figure of him is the right choice in solving problems related to the Ummah. However, in the Sumenep community itself, such views have shifted, the figure is informed in a form that may be 360 degrees in difference, namely the political

Islamic cleric. The dualism inherent is in the question, when he becomes the figure of a religious one and when he becomes a politician. The purpose of this research is to know this position in the Sumenep area, so as to avoid being biased towards the figure of the Islamic cleric. The method used in this research is descriptive qualitative with a critical approach, so that the theory and the results of the data are actually analyzed theoretically. The results of this study indicate that the position of the Islamic cleric in Sumenep experiences dualism. This happens because of the impact of globalization which changes the position from a religious figure into a politician one. So, it is not surprising if the position begins absurd and difficult to distinguish. Therefore, it effects on understanding pattern of the Sumenep community towards the Islamic cleric who has doubled positions, a religious one and a politician.

Keywords: islamic cleric, agent-structure, globalization



PENDAHULUAN

Pulau Madura adalah pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa, secara geografis Madura memiliki 5.168 km² dengan penduduk +- 4 juta jiwa. Suramadu adalah gerbang utama transportasi jalur darat yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Terdiri dari Empat kabupaten di pulau Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dari empat kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten Sumenep yang berada diposisi paling ujung pulau, dengan beberapa pulau kecil yang terpisah.

Secara kesejarahan Sumenep memiliki deretan historis berdirinya sebuah kerajaan. Pada era Kerajaan Singhasari, Sumenep dipimpin oleh Adipati Arya Wiraraja yang menjadi dalang pembangunan kerajaan Majapahit. Kultur dan budaya masyarakat Sumenep secara alamiah memiliki sifat halus baik dari tutur Bahasa, tindakan dan cara berfikir, dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya. Kultur kerajaan banyak memberi pengaruh psikologis pada masyarakat Sumenep, tetapi tidak hanya kultur kerajaan, masyarakat Sumenep juga berpegang teguh pada pedoman “bepak, bepuk, ghuruh, rato” (Bapak, Ibuk, Guruh Dan Penguasa) sebagai bentuk kepatuhan.

Bentuk kepatuhan masyarakat Sumenep pada bapak dan ibu sebagai landasan falsafah, bahwa kita dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua kita, guruh adalah tempat dimana kita menimba ilmu pengetahuan, sedangkan raja atau penguasa memberi perlindungan pada rakyatnya. Bentuk kepatuhan inilah sampai saat ini masih melakat pada kultur masyarakat Sumenep. Kepatuhan adalah bentuk jalan hidup masyarakat Sumenep salah satunya pada sosok guru. Konotasi guru dalam pandangan masyarakat Sumenep bisa, guru ngaji¹, guru sekolah²,

¹ Guru ngaji adalah guru yang biasa mengajarkan baca Al-qur'an di musollah

² Guru sekolah adalah guru yang mengajar pada Lembaga resmi seperti sekolah formal

dan guru pondok³. Guru pondok atau kiyai biasanya memiliki banyak santri dibanding dengan tipologi guru dalam pandangan masyarakat Sumenep.

Masyarakat Sumenep menempatkan sosok kiyai pada posisi tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat, karena kiyai bagi masyarakat Sumenep adalah sosok yang di istimewa karena memiliki pengetahuan agama yang sangat dalam. Sebagai sosok yang di kharismakan tentunya posisi kiyai bagi masyarakat Sumenep memiliki pengaruh yang besar pada persoalan bentuk kepatuhan. Tetapi yang menarik pada saat ini, sosok kiyai yang dulunya sebagai sumber pengetahuan atas ajaran agama, sebagian kiyai bertransformasi dalam bentuk yang berbeda, salah satunya seperti terlibat dalam politik. Bentuk transformasi inilah yang menarik untuk dilihat dalam bagaimana strukturalisme Anthony Giddens dan tantangan globalisasi pada peran sosok kiyai yang ada di Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekwensi Globalisasi Ala Anthony Giddens

Perkembangan zaman atau era globalisasi ini memang memberikan berbagai kemudahan sekaligus kekhawatiran. Berbagai kemudahan yang dihasilkan dari perkembangan zaman menjadi dampak positif, namun kekhawatiran inilah yang akan menjadi dampak negatifnya (Zahid 2019, 5). Setidaknya inilah cara pandang sederhana dalam pembahasan globalisasi, tetapi pada literasi lain, globalisasi diartikan sebagai perubahan atau kehendak untuk berubah, sehingga perubahan yang di hasilkan memiliki dua fungsi secara serius. Pembahasan globalisasi tokoh yang sensitif dalam pembahasannya tidak lain seperti Anthony Giddens. Di tahun 1999 Giddens menuliskan buku "Runaway World" atau dunia yang lepas kendali yang diakibatkan oleh adanya globalisasi. Secara terperinci pembahasan globalisasi mereduksi bagi penganutnya, sehingga pandangan atas kemungkinan terburuk tidak bisa diprediksi lantaran terhipnotis oleh kata "perubahan".

Popularitas ide globalisasi berkaitan erat dengan teori McLuhan pada konsep "Global Village", diskursus atas teori McLuhan, berimbas pada pemahaman kaum skeptis dan kaum radikal. Kaum skeptis menganggap Globalisasi adalah bentuk ketidaknyamanan sehingga cara berfikir ini cenderung apatis dalam menanggapi sebuah perubahan yang terjadi. Kaum skeptis melihat perubahan tidak berlandaskan pada proses globalisasi, tetapi perubahan adalah proses keberlanjutan dari hari yang telah berlalu. Cara pandang ini dikategorikan sebagai penganut mazhab kiri lama yang cenderung melihat perubahan seperti proses alamiah. Berbeda dengan kaum radikal, globalisasi dianggap sebagai bentuk kenyataan yang mau tidak mau akan sampai pada perubahan manusia, baik dalam bentuk budaya, ekonomi, sosial dan politik. Imbas dari terjadinya globalisasi tampak saat banyak negara yang kehilangan garis teritorial negaranya, karena berbagai bentuk monopoli dari kekuatan negara maju, inilah yang dilihat Giddens sebagai konsekwensi dari globalisasi.

³ Guru pondok biasanya diartikan pada pemilik pondok atau Lembaga yang didirikan oleh seorang kiyai.

Globalisasi dalam pandangan Giddens tidak hanya berpengaruh pada ruang yang makro tetapi pada ruang mikro, seperti keluarga. Kompleksitas dari tumbuh kembangnya globalisasi membebankan konsekwensi logis dari berkehidupan, inilah kenapa Giddens menganggap globalisasi sebagai keniscayaan yang nyata dari segala lini kehidupan. Konsekwensi yang dihasilkan dari diskursus globalisasi ini, pertama, globalisasi tidak hanya membangun hirarki baru, tetapi globalisasi mengakuisi tatanan masyarakat akar rumput. kedua, melahirkan budaya baru yang bersifat global, tetapi juga merangsang budaya nasionalisme lokal. ketiga, basis ekonomi multinasional, tetapi juga membangun zona ekonomi regional. Perubahan yang terjadi inilah yang mengakibatkan perubahan dalam bentuk struktur dan nilai yang bersifat holistik.

Bukan globalisasi namanya jika tidak memberi perubahan besar dalam struktur ekonomi, bisa terlihat perusahaan multinasional semakin menjamur di lahan dunia ketiga dengan alibi perubahan (globalisasi). Bagaimana mungkin konsep global village mampu diterapkan jika penguasaan atas lahan dan hak manusia dikebiri (global pillage). Kompleksitas globalisasi terlihat dalam bentuk krisis lingkungan, kesenjangan sosial, permasalahan makro dan mikro semakin kasat mata. Kontradiksi dampak globalisasi penanggulangan yang serius, salah satu yang ditawarkan Giddens adalah membangun masyarakat cosmopolitan (global cosmopolitan society) (Sudarma 2003, 33). Pemikiran Giddens dalam melihat globalisasi sangat menarik, karena determinisme globalisasi memberi ruang untuk melihat garis demarkasi antara pemikiran “kiri-kanan” melalui jalan ketiga. Kemahiran Giddens dalam membaca dan merumuskan fenomena ini, terbukti dalam bentuk teori Strukturasi dalam membaca ruang perubahan dan perkembangan sosial di era kontemporer.

Agensi-Struktural Anthony Giddens

Walaupun bukan seorang Marxis, namun terdapat pengaruh Marxian yang cukup kuat dalam karya Giddens. Teori Marx hanyalah salah satu dari begitu banyak masukan teoritis ke dalam teori strukturasi. Giddens melihat banyak teori yang dimulai dari individu/agen (misalnya, interaksionisme simbolik) atau masyarakat/struktur (misalnya, fungsionalisme struktural) dan menolak kedua kutub alternatif tersebut. Ia berpendapat bahwa kita harus mengawalinya dari “praktik sosial yang tengah berlangsung”. Ia menyatakan bahwa ranah dasar studi ilmu sosial, menurut teori strukturasi, bukan pada pengalaman aktor individu atau eksistensi bentuk totalitas sosial apapun, melainkan praktik yang ditata di sepanjang ruang dan waktu” (Giddens 1984, 2). Teori strukturasi Giddens yang fokusnya pada praktik sosial yang dilakukan manusia adalah sebuah teori hubungan antara agensi dengan struktur. Agensi dan struktur tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain, mereka adalah dua sisi koin yang sama. menurut Giddens, mereka adalah dualitas. Semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial.

Strukturalisme sendiri pada mulanya mengkritisi cara pandang dualisme dan mencoba mencari satu pertautan antara “struktur fungsional dan konstruktifisme fenomenologis”, kritik Giddens atas dualisme ini terlihat pada kaum struktural fungsional yang menurutnya berada pada posisi naturalistik, pandangan yang mereduksi aktor dalam struktur. Tidak hanya pandangan itu, Giddens melihat bentuk sejarah sebagai bentuk mekanis tidak melihatnya pada produksi kontegensi aktivitas agen. Posisi dualism dalam pandangan Giddens dalam struktur dan agen, dilihat dalam bentuk tindakan manusia disebabkan oleh dorongan eksternal, sedangkan dalam cara pandang lain, sebenarnya manusia berorientasi pada tujuan dari tindakan tersebut. Bentuk dualism inilah Giddens melihat struktur tidak bersifat eksternal bagi individu, tetapi lebih pada bentuk internal dari subjek individu. Pandangan Giddens pada pola internal di dalam individu memiliki kekuasaan dalam mengontrol struktur yang ada.

Dalam pandangan Giddens struktur tidak disamakan sebagai subjek kekangan (*constraint*), namun struktur bersifat selalu mengekang (*constraining*), serta membebaskan (*enabling*). Artinya Giddens melihat cela dari struktur sistem sosial yang bersifat bebas di dalam aktor individu, sehingga antara aktor dan struktur memiliki fungsi masing-masing tetapi tidak saling mengekang. Asumsi sederhana bagaimana cara Giddens menyerdehanakan struktur dan agen pada bentuk subjek manusia dalam bertindak secara sengaja menyelesaikan tujuan mereka, tetapi pada waktu yang bersama, tindakan manusia memiliki konsekwensi dari apa yang ia kerjakan, sehingga berimbas pada bentuk keberlangsungan dalam tindakan agen selanjutnya, artinya, agen dalam bertindak memiliki alasan-alasan pada pilihannya.

Titik tolak dalam teori agensi-struktural Giddens sebenarnya lebih pada kesadaran dan reflektif, agen tidak hanya sadar akan dirinya namun keterlibatan dalam aktivitas dan kondisi sosial yang telah berlangsung adalah konsekwensi dari tindakan agen terhadap struktur, ditengah proses keterpaduan agen dan struktur Giddens menyebutnya “dialektika” yang dihasilkan oleh struktur, dan kesadaran. Sebenarnya Giddens dalam teorinya memperlihatkan agensi-struktur dalam ruang historis, prosedural dan dinamis. Bukan hanya aktor sosial yang bersikap reflektif, peneliti sosial yang melakukan kajian atasnya pun demikian pula.

Gagasan ini membawa Giddens pada gagasan terkenalnya tentang “hermeneutika ganda”. Aktor sosial dan sosiolog menggunakan bahasa. Aktor menggunakan bahasa untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan, dan sosiolog, menggunakan bahasa untuk menjelaskan tindakan aktor-aktor sosial tersebut. Jadi, kita perlu memusatkan perhatian pada hubungan antara bahasa awam dengan bahasa ilmiah. Secara khusus kita perlu menyadari fakta bahwa pemahaman sosial ilmuwan sosial atas dunia sosial mungkin membawa dampak pada pemahaman aktor yang tengah dipelajari. Dalam hal ini, peneliti sosial dapat mengubah dunia yang mereka pelajari, selanjutnya sampai pada temuan dan kesimpulan distortif.

Strukturalisme Giddens terletak pada gagasan struktur, sistem, dan dualitas struktur dimana konsep inilah yang menjadi inti dari pemikirannya. Tetapi, disisi lain yang perlu diperhatikan untuk membaca Giddens salahsatunya adalah; Pertama, alih-alih terfokus pada masyarakat manusia, teori strukturasi berkonsentrasi pada ‘penataan institusi di sepanjang ruang dan waktu’. Kedua, ada perhatian yang ditujukan pada perubahan institusi di sepanjang ruang dan waktu. Ketiga, peneliti perlu peka terhadap cara-cara yang dilakukan oleh pemimpin berbagai institusi dalam mencampuri dan mengubah pola-pola sosial. Keempat, strukturasionis perlu melihat, dan peka, terhadap dampak temuan-temuan mereka pada dunia sosial. Yang paling umum, Giddens banyak memberikan perhatian pada “dampak menghancurkan modernitas dan strukturasionis harus memusatkan perhatiannya pada studi atas tekanan persoalan sosial ini.

Pola Masyarakat Sumenep dan Relasi Kuasa

Secara geografis Madura memiliki 4 Kabupaten yang terdiri dari, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Terletak di timur Pulau Jawa dengan kordinat 7° lintang selatan dan antara 112° dan 114° bujur timur. Panjang Pulau Madura kurang lebih 190 KM, jarak terlebar 40 KM, dan luas secara keseluruhan 5.304 KM (Wiyata 2002, 37). Sosio-kultur masyarakat Madura yang masih lekat dengan tradisi dan falsafah leluhur, membuat masyarakat Madura berhati-hati dalam ucap, karena bagi masyarakat Madura ucapan yang menyinggung harga diri akan berdampak pada integrasi konflik yang Panjang, selaras dengan falsafah, ‘ango’an pote tolang etembang pote matah, artinya lebih baik putih tulang dibandingkan putih mata. Maka, imbas dari hal inilah cakok menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian masalah (Ma’arif 2015, 46).

Masyarakat Madura, khususnya masyarakat Sumenep yang terletak diujung paling timur Pulau Madura dijuluki sebagai Jawanya Pulau Madura, hal ini selaras dengan sikap lembut, tutur sapa yang halus dan lebih memilih musyawarah dalam penyelesaian permasalahan, bukan berarti masyarakat Sumenep tidak berani untuk melakukan carok, tetapi masyarakat Sumenep mulai ada kesadaran jika hal ini dilarang oleh hukum negara bahkan agama. Mayoritas masyarakat Sumenep hampir beragam muslim, tetapi juga ada yang beragama seperti, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998, 41). Secara historis, Islamisasi masyarakat Madura merupakan agenda dakwah di antara abad ke 7 sampai abad ke 15 melalui jalur perdagangan, peran para Wali, Buju’ dan Kiyai, serta para penguasa kerajaan (Ma’arif 2002, 143-146). Sehingga ciri khas islam masyarakat Madura adalah Islam Nusantara yang mencerminkan ajaran luhur masyarakat lokal dengan agama Islam Timur Tengah sehingga menjadi konsep Islam yang sesuai dengan karakter masyarakat Madura yang terasimilasikan dan melahirkan spirit keislaman yang kuat karena tidak ada benturan secara kultur di kalangan masyarakat Madura, khususnya Sumenep (Paisun 2010).

Ralisi kuasa masyarakat Sumenep dapat dilihat dalam empat bentuk yaitu (Buppa’ Babbu, Guru ban Rato) (Wiyata 2002, 234). Pola relasi kuasa masyarakat Sumenep menandakan jika dalam

kehidupan sosial-budaya serta religiusitas masyarakat masih terbilang tinggi, tidak terkecuali di masyarakat Sumenep, jika masih ada darah Madura pola relasi ini masih terpatri dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sumenep umumnya, kasta tertinggi dalam hirarki relasi kuasa ini adalah orang tua, karena dengan adanya mereka kita mampu melihat dunia, sehingga kepatuhan atas orang tua tidak ada tawaran lagi. Selain orang tua, sosok Kiyai adalah relasi kuasa kedua sebagai insan yang mengerti keagamaan yang kuat. Kiyai sosok yang dimintai nasihat dalam persoalan apapun khususnya agama, karena masyarakat Sumenep yakin apa yang didawuhkan adalah kebenaran yang perlu kita ikuti (Ma'arif 2002, 128). Hal inilah yang membuat masyarakat Sumenep tidak berani untuk melawan, mengkoreksi, karena kiyai adalah sosok yang perlu dihormati setelah orang tua. Sehingga legitimasi sosok kiyai atas realitas sosial sangat berpengaruh besar, inilah yang nantinya penulis akan lihat dalam bentuk pergeseran sosok kiyai.

Legitimasi yang lahir dari sosok kiyai tidak lepas dari peran kiyai dalam penyebaran agama Islam pertama di pulau Madura, yaitu Wali Songo. Selain itu gerakan sosial masyarakat tempo dulu, saat melawan penjajahan, fatwa kiyai menjadi spirit perlawanan bagi masyarakat Madura (Ma'arif 2002, 130). Dua alasan inilah kenapa sosok kiyai patut dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat Madura. Selain sosok kharismatik dan memiliki legitimasi kuat, pendidikan masyarakat Madura umumnya berada di pesantren, peran sentral dari sosok kiyai juga berperan banyak, jadi hal yang wajar jika pengaruh kiyai begitu besar di Masyarakat Madura (Muryadi Mochtar 2004, 29). Relasi kuasa juga tercermin dalam wujud rato (raja), paham rato di masyarakat Madura disebut sebagai ulim amri atau pemimpin secara formal dalam suatu pemerintahan. Rato disimbolkan sebagai sosok yang mampu mengatur jalannya kehidupan masyarakat, seperti kesejahteraan, perekonomian dan menjaga stabilitas keamanan bagi pengikutnya. Fungsi rato sangat dibutuhkan disektor kenegaraan, karena karakteristik masyarakat dalam pola kebijakan politik cenderung diam terhadap kebijakan penguasa. Hal yang wajar jika kontestualisasi politik di Madura atau Sumenep sendiri sangat jarang ada kritik atas pemimpin, apalagi sosok pemimpin yang dianggap rato adalah sosok kiyai (Wahyudi 2015, 12).

Kekuatan sosok kiyai dan rato dikalangan masyarakat Madura memberi imbas yang besar, hal ini bisa dilihat saat terjadi kebijakan penguasa yang "merugikan" masyarakat, maka kecenderungan untuk diam dan menerimanya besar pula. Bentuk ketaatan dengan cara diam adalah bentuk komunikasi masyarakat Madura dalam menghormati sosok rato dan kiyai. Tetapi, bisa saja pada akhirnya ada gejolak dalam bentuk ketidaktahuan, dan apatisisme politik (Wahyudi 2015, 12). Sehingga realasi kuasa masyarakat Sumenep Madura lebih pada politik parokial, dimana politik yang tingkat partisipasi politiknya rendah dan apatis terhadap sistem politik (Mujani 2007, 4).

Politik Identitas Berbasis Massa

Dominasi globalisasi tidak hanya berimbas pada pergeseran peran kiyai di Sumenep sebagai sosok yang dipatuhi secara agama kini bertransformasi menjadi wajah baru, yaitu politik identitas berbasis massa. Basis massa dapat dilihat tidak hanya pada lekatnya identitas dari seorang kiyai, tetapi modal simbolik, sosial, budaya dan ekonomi menjadi pertarungan arena dalam politik. Massa yang diperoleh bisa secara cultural atau konvensional seperti relasi politik pengusung partai dan massa secara cultural bisa sebagai alumni atau simpatisan. Secara historis, politik identitas lahir dari kepentingan satu kelompok karena memiliki kesamaan seperti, ras, suku atau keagamaan. Artinya, politik identitas akan lekat pada politik perbedaan, biopolitik yang diusung biasanya atas dasar perbedaan biologis, pada dasarnya politik identitas muncul pada kajian filsafat, tetapi baru pada Internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional di Wina pada 1994 masuk pada kajian ilmu politik (Abdillah 2002, 16). Pada kajian sosiologis, politik identitas dikategorisasikan menjadi dua, identitas sosial yang berumpun ras, kelas, etnis dan gender dan identitas politik seperti nasionalisme dan kewarganegaraan. Identitas politik menjadi penentu dari arah relasi kuasa para politisi yang memiliki rasa *sense of belligerence* dan *sense of otherness* (Setyaningrum 2005,19).

Politik identitas mengacu pada mekanisme yang berlandaskan pada organisasi identitas sebagai sarana politik (Setyaningrum 2005,19). Sarana ini sebagai wadah dalam relasi secara politisi, tetapi tidak menutup kemungkinan partai pengusung sebagai modal symbol dan sosial untuk menopang identitas dari sosok kiyai. Sebagian besar masyarakat Sumenep memiliki keterikatan religiusitas yang tinggi, fanatisme dan rasa menghormati pada sosok kiyai menjadi hal yang wajar jika bakal calon adalah sosok kiyai atau keluarga dalam akan semakin kuat relasi identitas di akar rumput. Setidaknya ada tiga pandangan yang membentuk identitas yaitu: Primordialisme, identitas yang diperoleh secara alamiah atau keturunan. Konstruktivisme, dimana identitas ini dibentuk oleh realisasi sosial yang kompleks secara cultural pada masyarakat, dan instrumental, identitas ini sering dilekatkan pada kepentingan elite politik sebagai aspek kekuasaan (Widayanti 2009, 14-15). Tiga bentuk identitas yang paling berpengaruh kuat dimasyarakat Sumenep adalah identitas primordialisme, dimana secara alamiah dan kultural inilah yang membentuk kepercayaan akan sosok kiyai mampu menanggulangi problematika yang terjadi di ranah sosial.

Keyakinan atas kemampuan sosok kiyai yang terjun pada jalan politik tidak terlepas dari bentuk konstruktifisme kepemimpinan klasik tentang definisi kiyai tempo dulu. Sosok yang memiliki rasa adil, dan bijak sana dalam menentukan kebijakan. Tetapi, dampak dari kepercayaan yang berlebih akan berimbas pada integrasi konflik yang sangat tinggi antar pendukung, hal ini disayangkan jika bakal calon sama-sama dari sosok kiyai. Politik identitas berbasis massa tentu akan menjadi pergolakan yang sangat besar, sehingga sistem demokrasi akan bergeser pada berlomba-lomba pada relasi pertemanan sehingga sistem yang dijalankan demokrasi oligarki yang

sarat dengan tendensi perpecahan (Hanifiya 2018). Praktik demikian tentu tidak akan terlepas dari isu yang diangkat, apa lagi dikalangan masyarakat Sumenep. Terjunnya tokoh agama seperti kiyai di masyarakat Semenep merubah wajah perpolitikan yang pada dasarnya politik sebagai hal yang kurang elok karena identik dengan perebutan kekuasaan, kini berganti wajah sebagai basis kekuatan untuk merubah kehidupan masyarakat yang lebih berwarna.

Kiyai Sumenep dalam Lingkaran Arus Globalisasi

Kiyai di daerah Sumenep merupakan tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi sentral mereka itu sangat terkait dengan kedudukan kiyai sebagai sosok pemimpin umat yang memiliki kedalaman ilmu agama dan sebagai sumber tauladan umat. Sehingga dengan moralitas kultur keagamaan, secara tidak langsung masyarakat di Sumenep memberikan otoritas dan kharismatik terhadap kiyai. Memahami tradisi dan cara pandang masyarakat keagamaan sebagai dasar pola kehidupan masyarakat di Sumenep. Artinya terbentuknya kekuasaan kiyai mempunyai kaitan erat dan tidak dapat terlepas dari pengaruh nilai-nilai tradisi lokal serta cara pandang masyarakat Sumenep itu sendiri. Masyarakat Sumenep adalah masyarakat yang terkenal halus, dan sopan santun dibanding dengan daerah-daerah yang ada di pulau Madura. Hal ini menjadi satu ciri khas dengan masyarakat yang masih teguh akan “bepak, bepuk, ghuruh, rato” (Bapak, Ibuk, Guruh Dan Penguasa). Konsep kepatuhan tersebut menjadi hal yang sangat dipelihara oleh masyarakat Sumenep, karena semua apa yang di katakan dan difatwakan- hal yang baik- akan diikuti dan diamini oleh masyarakat tanpa mengunyah terlebih dahulu.

Elemen yang akan di bahas dalam tulisan ini, yaitu “ghuruh”. Ghuruh atau guru adalah sosok yang mempunyai keilmuan yang luas dalam bidang agama,⁴ dengan fatwanya masyarakat akan mendengarkan dan menjadi panutan dari setiap pola kehidupannya, seperti itu guruh atau kiyai dalam implementasi yang sebenarnya. Kondisi demikian akan tetap bertahan, karena peran dan fungsi kiyai di daerah Sumenep merupakan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan proses keberlangsungan dinamika sosial keagamaan. Oleh sebab itulah, secara sosiologis pola hubungan antara masyarakat dengan kiyai memiliki hubungan asimetris. Kiyai ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kekuasaan serta kewenangan yang lebih besar dan di yakini mampu menentukan keberlangsungan hidup masyarakat keagamaan di daerah Sumenep.

Kiyai sebagai sosok tokoh yang memiliki kedalaman ilmu dan didukung dengan kepercayaan dari masyarakat bahwa tindakan kiyai diyakini sesuai dengan tuntunan agama, sehingga kiyai menganggap dirinya sebagai orang yang paling tau tentang dalil-dalil, oleh karena itu kyai bisa

⁴ Definisi ini penulis mendapatkan sejak mondok di pesantren, bahwa guru bukannya yang ada di kelas kelas formal, akan tetapi lebih tepatnya sosok guru adalah tokoh panutan seperti kiyai, karena kiyai di anggap mamapu dan mempunyai wawasan yang luas mengenai keagamaan. Toh walaupun tidak di pungkiri ba yak masyarakat yang tau bahkan mendalami ilmu agama, tapi sumber dari pengetahuan tersebut di dapat saat pengajja, dan ceramah agama dari sosok kiyai. Maka dari itu definisi secara konser fatif guruh adalah seorang kiyai.

melakukan tindakan apapun (Haryatmoko 2003, 126). Sehingga kecenderungan inilah, sosok kiyai dalam peralihan dari seorang penuntun masyarakat menjadi ikut andil dalam birokrasi. Peran dan fungsi sosok kiyai bertransformasi secara 180 derajat, ketika hal ini terjadi maka tugas dan peran kiyai akan berbeda, akan tetapi fatwa dan identitas masih melekat padanya sebagai sosok yang kharismatik.

Perubahan sosok kiyai ini adalah hasil dari lahirnya globalisasi yang kian semakin pesat, perubahan-perubahan ini menghasilkan fungsi dan peran dari manusia menjadi manusia yang lainnya. Globalisasi dibidang kebudayaan telah menyebarkan perilaku dan nilai-nilai, sehingga kebudayaan yang lama dan tatanan nilai sedikit bergeser. Globalisasi dalam bidang ini juga dapat mengubah cara berfikir seseorang sehingga dapat merubah tingkat sosial budaya manusia. Pergaulan antarindividu yang berbeda telah terjadi perpindahan nilai budaya.

Secara kultural sosok kiyai di Sumenep dibentuk oleh moralitas keagamaan sebagai elit yang menempatkan mereka pada posisi penting yang mempunyai peranan power dalam masyarakat keagamaan. Realitas kultur keagamaan menjadikan kiyai sebagai sosok kharismatik dan sekaligus tokoh percontohan "reference group" yang menggambarkan broker budaya (kultur broker) (Romas 2003, 3). Posisi yang sentral menentukan sikap dari masyarakat, bisa saja dengan memperoleh kepercayaan penuh, sosok kiyai bisa mengendalikan perannya dalam bidang birokrasi. Seperti hanya masuk dalam parpol, dengan adanya tokoh kiyai parpol yang di usungnya menjadi meningkat lantaran posisi kiyai tersebut berada di dalam parpol tersebut.

Tidak menuntut kemungkinan pergeseran peran dan nilai seorang kiyai dalam fungsi sesungguhnya telah sedikit terkikis oleh era globalisasi. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai keseluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media, dan perjalanan luar negeri. Konsumsi budaya bersama turut mendorong pertukaran barang dan kolonisasi yang menyebarkan budaya ke seluruh dunia. Penyebaran budaya memungkinkan seseorang terlibat dalam hubungan sosial lintas negara dan kawasan. Penciptaan dan perluasan hubungan sosial seperti ini tidak terlihat ditingkat material. Globalisasi budaya melibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas budaya mereka, baik individu atau kelompok. Globalisasi budaya terus meningkatkan keterkaitan penduduk dan kebudayaan di dunia.

Selain itu juga, globalisasi yang disertai dengan teknologi semakin canggih membuat arus kebudayaan luar akan mudah masuk ke Indonesia. Teknologi yang semakin canggih membuat arus informasi mudah untuk disebarkan. Dalam sebuah teknologi, sekat antar negara-bangsa bisa 'dihilangkan'. Orang dengan mudah mengenal kebudayaan lain di luar daerah dan juga negara.

Ketika globalisasi masuk dilam masyarakat yang akan terjadi proses, Akulturasi, Asimilasi, Sikap Meniru, Sekularisme. Ketika hal ini terjadi kata Durkheim akan terjadi perubahan sosial

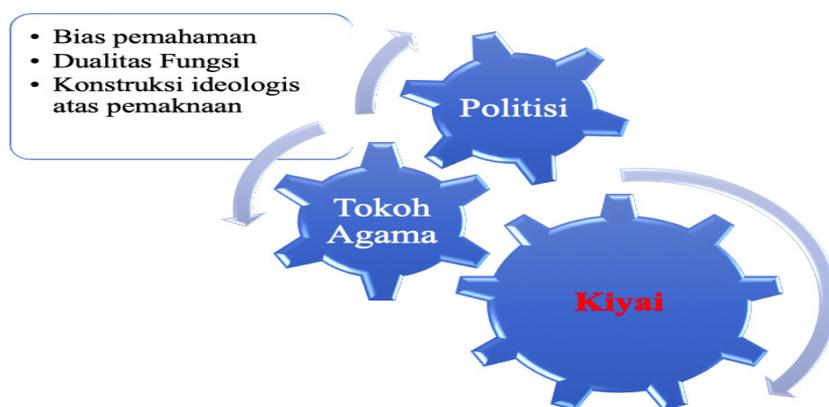
yang sangat terlihat. Hal ini terjadi ketika globalisasi masuk ranah kebudayaan sehingga akan ada benturan budaya lama dengan budaya yang baru. Akan tetapi, globalisasi bukanlah sebuah proses tunggal, namun perpaduan proses yang kompleks, yang sering sekali berjalan secara bertentangan, sehingga menimbulkan konflik, perpisahan dan bentuk bentuk baru stratifikasi (Giddens 2009, XVII). Giddens memandang globalisasi sebagai akar lahirnya tatanan sosial pasca-tradisional atau post-tradisional. Sebuah tatanan post-tradisional bukanlah tatanan yang tradisinya akan lenyap, akan tetapi berubah dalam bentuk sistem yang baru. Dalam peran kiyai yang dulunya sebagai pengayom masyarakat, sebagai panutan masyarakat, akan berubah sistem dan fungsinya ketika sosok kiyai berada di dalam birokrasi atau memasuki partai. Hal ini benar ramalan Giddens dalam perpolitikan, akan terjadi peralihan fungsi tradisi lama kedalam tradisi baru yaitu peran yang baru tanpa menghapus peran yang lama.

Ketika sistem globalisasi masuk dalam tatanan budaya dan fungsi dari sosok kiyai, tidak akan selalu berjalan dengan selaras, tidak menuntut kemungkinan ada gesekan dari masyarakat yang pro dan kontra. Hal ini di anggap wajar karena politik akan menimbulkan sebuah kres antara masyarakat yang pro dan masyarakat yang kontra. Anggap saja jika dahulu sosok kiyai A sebagai panutan masyarakat B, C dan D. setelah kiyai tersebut masuk dalam ranah birokrasi maka yang patuh tinggal masyarakat C dan D, sedangkan B tidak setuju, bahkan tidak menggap apa yang dibicarakan oleh kiyai tersebut adalah fatwah yang benar.

Konflik tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketidak-setujuannya Kiyai menjadi pejabat birokrasi melainkan juga dari partai yang mencalonkannya. Seorang Kiyai yang dicalonkan oleh partai tertentu belum tentu pengikutnya menjadi partisan atau loyal terhadapnya. Seorang bisa saja ditolak oleh masyarakat hanya karena partai, bukan disebabkan oleh kotradiksi sosok Kiyai. Dengan demikian, haluan ideologi partai adalah alasan kenapa Kiyai tidak didukung oleh partisansya. Lambat laun kharisma Kiyai dalam masyarakat yang tidak mendukungnya semakin surut.

Sebagai masyarakat Sumenep yang kental akan keagamaan dan kepatuhan terhadap sosok kiyai, tentu tidak dipungkiri adanya hubungan masyarakat dan agama, adapun fungsi dari agama dapat dipahami yaitu dengan suatu peranan yang telah atau masih dimainkan oleh agama dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat-masyarakat tersebut (Nottingham 1994, 31). Akan terlihat dari bentuk masyarakat yang nyata dengan keteraturan yang telah didasari oleh nilai-nilai agama yang dijadikan fondasi awal dalam kultur tradisi kepatuhan terhadap sosok kiyai. Dengan agama sebagai dasar kepatuhan dapat digunakan oleh seorang kiyai dalam menjalankan tugasnya sebagai orang yang di percaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam wilayah sosiologis agama selalu ditarik pada fokus pemahaman kajian yakni agama sebagai realitas yang membentuk fakta sosial (*social fact*)(Scharf 1995, 30).

Dalam kenyataan ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam perubahan yang terjadi akibat globalisasi budaya yang terjadi di Sumenep dapat menimbulkan relasi atau pertukaran yang terjadi di antara kiyai yang mempunyai ilmu yang dalam dalam keagamaan, dan sebagai tokoh yang kharismatik, sehingga ditempatkan pada posisi yang sentral dalam ranah sosial. Sehingga masyarakat secara tidak langsung menempatkan dirinya di bawah posisi kiyai tersebut agar terjalin keharmonisan dalam kehidupan beragama. Dari hal tersebut adanya tarik menarik secara mendasar dalam pola hubungan di atas, maka pola hubungan tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu pertukaran sosial (Zaitin 1995, 121).



Sekali lagi benar apa yang di ramalkan Giddens mengenai globalisasi yang berdampak besar terhadap perubahan masyarakat, dari kebudayaan yang sifatnya fundamental menjadi cosmopolitan, akan tetapi fundamentalisme menjadi kekuatan dari global guna memajukan tujuan mereka, fundamental bisa berbentuk apa saja seperti, keagamaan, etnisitas, dan politik. (Ritzer 2014, 980). Dari uraian globalisasi terhadap tatanan agama dapat dilihat dari permasalahan di atas bahwa agama dan peralihan fungsi kiyai menjadi efek dari terjadinya globalisasi yang terjadi dalam ranah politik yang ada di Sumenep.

Transformasi fungsi kiyai yang semula berada dalam ruang keagamaan ke ruang birokrasi negara (pemerintahan) merupakan sebuah realitas sosial keagamaan. Kiyai adalah sosok yang memiliki peran dan fungsi sentral dalam kultur keagamaan, menjadikan kiyai sebagai sosok kharismatik dan menempati posisi elit dalam struktur dinamika masyarakat keagamaan. Kekuasaan dan kewenangan tercipta dengan alami, kiyai sebagai unsur yang paling menentukan keberlangsungan tradisi dan hidup masyarakat keagamaan. Berangkat dari sebuah realitas kultur tersebut, sebagian kiyai memperluas kekuasaan yang lebih formal melalui politik praksis dengan duduk dalam ruang pemerintahan di Sumenep.

Keterlibatan Kiyai dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia bukan hal baru dalam percaturan politik di Indonesia. Sejak era kerajaan Hindu-Buddha hingga Islam, tokoh agama dilibatkan dalam kerajaan. Mereka difungsikan sebagai penasihat raja terutama dalam bidang

keagamaan. Dalam kerajaan Mataram Islam, misalnya, tokoh agama yang terlibat dalam kerajaan disebut mudin. Mereka bekerja di bawah seorang raja untuk membantu dalam bidang keagamaan. Mereka diberi wewenang mengelola masjid untuk dijadikan sebagai tempat dakwah dan belajar agama Islam oleh raja dan wong cilik (Kuntowijoyo,).

Sementara itu, di desa-desa Jawa gambaran tentang Kiai masuk dalam wilayah politik sudah ada sejak lama. Fungsi Kiyai dalam struktur desa memiliki dualitas fungsi. Fungsi pertama Kiai merupakan tokoh agama yang menjadi pusat orang untuk bertanya tentang ajaran agama. Sosok Kiyai yang memiliki ilmu agama membuat kharisma seorang Kiyai semakin tinggi. Pada waktu yang sama Kiyai juga menjadi tempat untuk bertanya bagi pemerintah desa ataupun daerah setempat tentang problem sosial. Kiyai juga diperankan sebagai penyaring informasi dari luar apakah sesuai dengan realitas masyarakat atau tidak. Peranan Kiyai seperti ini menurut Clifford Geertz disebut dengan cultural broker (Clifford Geertz,). Namun menurut Geertz, peran Kiyai akan macet apabila arus informasi dari luar mengalir begitu deras sehingga Kiyai tidak mampu untuk menfilternya, maka yang terjadi adalah cultural lag.

Di era globalisasi saat ini, arus modernisasi sangat pesat. Perubahan struktur dan sistem masyarakat lambat laun juga akan berubah. Dalam keadaan seperti ini, menurut Horikoshi, Kiyai justru bukan tidak mampu memfilter arus globalisasi sebagaimana pendapat Geertz di atas, akan tetapi Kiyai memiliki pembacaan yang teliti dan merumuskan skala prioritas dalam segi mana perubahan masyarakat akan dilakukan. Dengan demikian apa yang dikatakan Geertz tidak selalu benar. Kemampuan Kiyai dalam merumuskan skala prioritas membuat sosoknya lebih dihormati ketimbang kepala desa (Hiroko Horikoshi, 1987, 193).

Peran dan fungsi Kiyai tersebut semakin berkembang ketika Indonesia sudah memasuki era kemerdekaan. Demokratisasi yang mendorong adanya keterlibatan warga membuka kesempatan bagi seorang Kiyai untuk menunjukkan kemampuannya. Fenomena keterlibatan seorang tokoh agama dalam bidang politik sejak awal diperlihatkan di era revolusi. Kemampuan para Kiyai dalam memobilisasi massa telah berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Keterlibatan Kiyai dalam politik lebih sering dijumpai pasca Reformasi. Tidak jarang di setiap kota, tidak terkecuali dengan Sumenep, ada sosok Kiyai yang terlibat dalam politik praktis. Pada dasarnya Kiyai dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu tinggi. Peran serta kontribusinya dalam berdakwah di masyarakat membuat kharismanya meningkat. Secara tidak langsung popularitas dia sebagai sosok Kiyai juga semakin tinggi. Oleh karena itu, dalam pemilu atau pilkada mereka diuntungkan oleh popularitas yang selama ini melekat pada dirinya.

Duliatas fungsi Kiyai di era saat ini tidak lepas dari konflik. Posisi Kiyai dalam birokrasi berdampak pada cara pandang sederhana masyarakat secara umum, tidak terkecuali di Sumenep. Beberapa kasus sosok kiyai menjadi dengan kharismanya memberi simbol atas dirinya jika

pada kekuasaan birokrasi akan mencerminkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi paradog ketika sosok kiyai berada di lingkaran birokrasi yang tanpa tidak lagi sosok yang khasimatik tetapi politis. Peneliti tidak mengenalisir semua kiyai Sumenep adalah politisi, tetapi masyarakat Sumenep memberi label atas kiyai sosok yang suci dan rumah untuk kembali saat tersesat pada jalan yang salah, fungsi kiyai adalah mengayomi dengan rasa ikhlas, berlandaskan ajaran agama. Memberi pengajian pada masyarakat mengenai hal yang bersifat syari'at, tata sholat, zakat dan bagaimana menjadi manusia yang patuh pada tuhan.

Tipologi seperti ini sudah mulai berangsur-angsur surut lantaran kesibukan dalam pengerusan birokrasi sehingga tidak lagi memikirkan lembaga pesantren, jama'at, dan santri-santri yang pernah dibinanya. Dualitas fungsi dalam tubuh struktur kiyai inilah yang mengakibatkan bias pemaknaan masyarakat Sumenep. Ketika hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan "power" kharisma digunakan untuk memberi label atas konstruksi ideologi masyarakat Sumenep. Konstruksi ideologis atas sosok kiyai memberi dampak negatif dikalangan akar rumput, kata kiyai tak lagi menjadi sosok yang di kharismakan saat berubah menjadi politisi, walaupun ada beberapa yang bisa memosisikan sebagai kiyai tempo dulu. Dinyataanya tidak sedikit posisi kiyai menghilang samar-samar saat menjabat di pemerintahan. Kekaburan atas kepatuhan masyarakat Sumenep bisa dikatakan atas landasan trasformasi posisi sosok kiyai pada politisi.

Kekaburan tersebut akan semakin parah apabila Kiyai di Sumenep tersandung kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Kewibawaan serta kharisme seorang Kiyai perlahan akan menyusut. Dampaknya adalah kepercayaan masyarakat atas Kiyai tersebut juga akan semakin turun. Apabila hal demikian yang terjadi, maka sosok Kiyai dipandang tidak lebih dari sekedar politisi secara umum. Kiyai yang digadang-gadang bisa mengimplimentasikan nilai-nilai politik secara religius dengan menjauhi hal-hal seperti korupsi namun justru sebaliknya. Keadaan ini lah yang berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat kepada Kiyai tersebut.

Akan tetapi tidak semua Kiyai yang berperilaku demikian. Di Sumenep masih ada Kiyai-Kiyai yang memiliki orientasi untuk umat dan santri. Di tengah tantang globalisasi dan modernisasi masih ada di antara mereka yang tetap berada di jalur kultural sebagai kultural broker masyarakat. Selain itu juga, Kiyai yang terlibat jeratan politik tidak semua melakukan kesalahan. Masih ada Kiyai yang menaruh perhatiannya pada umat dan berada pada jalurnya. Nilai keislaman yang selama ini ia ajarkan kepada umatnya coba diimplementasikan dalam birokrasi. Semua itu tergantung pada individu-individu Kiyai apakah ia bisa mengontrol egonya ketika berada dalam lingkaran birokorasi atau tidak. Jika bisa maka hal itu tidak akan melunturkan kepercayaan masyarakat kepada dirinya, apabila sebaliknya yang terjadi maka kekaburan, kharisma, dan kepercayaan Kiyai kepada masyarakat akan luntur.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dualisme posisi sosok kiyai yang ada di Sumenep. Hal ini terjadi lantaran adanya dampak globalisasi yang memberi perubahan pola posisi kiyai yang awalnya sebagai tokoh agama bertransformasi menjadi politisi. Tidak heran, posisi kiyai di daerah Sumenep mulai mengalami kekaburan, sehingga membedakan kapan sosok kiyai berperan sebagai kiyai, atau kiyai yang politisi.

Seperti dua periode kepemimpinan bupati Sumenep, sosok kiyailah yang menjadi pemimpin sekaligus symbol “kiyai” melekat pada agen. Bias inilah yang mengindikasikan bahwa globalisasi tidak hanya berubah tatanan budaya, tetapi pada konstruktifisme posisi kiyai di masyarakat Sumenep berubah. Jika dahulu kala kiyai Sumenep memiliki kepercayaan penuh, sekarang bergeser, ada streotipe yang berbeda saat kata kiyai didengungkan oleh masyarakat. Posisi agen-struktur menjadi bias, inilah hasil dari analisis kritis Anthony Giddens saat melihat realitas sosial yang terjadi di Masyarakat Sumenep.

Saran

Penelitian ini pada dasarnya diperlukan penelitian yang lanjutan, berhubung regulasi kepemimpinan dalam pemerintahan di Sumenep menjadi pertimbangan agar tidak terjadi bias subjektifitas dari peneliti. Sehingga diperlukan untuk penelitian lanjutan agar lebih dalam lagi untuk melihat posisi kiyai di masyarakat Sumenep secara mendalam. Penelitian ini juga sebagai bentuk sumbangsih pengetahuan pada tataran pemahaman mendasar sosok kiyai di Sumenep agar tidak terjadi biar pemaknaan.



Bibliografi

- Abdillah, Ubed S. 2002. Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanpa Tanda Identitas. Magelang: Indonesiatara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Geografi Dialek Bahasa Madura, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Giddens Anthony, 1984. Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press
- Giddens Anthony. 2009. Melampaui Ekstrim Kiri Dan Kanan Masa Depan Politik Radikal. Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Giddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanifiya, 2018. Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) Jurnal Studi Agama-agama, Volum 1 nomer 1 tahun 2018
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara
- K. Nottingham Elizabeth. 1994. Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994
- M Zaitin Irving. 1995. Memahami kembali sosiologi “kritik terhadap teori sosiologi kontemporer”. Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Ma’arif, Samsul. 2015. The History of Madura, Yogyakarta: Araska
- Mujani, Saiful. 2007. Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik Pasca-Orde Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Muryad. Mochtar Lutfi. 2004. Islamisasi di Pulau Madura: Suatu Kajian Historis, Laporan Penelitian UNAIR
- Paisun, 2010. “Dinamika Islam Kultural (Studi atas Dialektika Islam dan Budaya Lokal Madura)”, dalam Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin, 1-4 November 2010.
- R. Scharf Betty. 1995. Kajian Sosiologi Agama. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta
- Ritzer George. 2014. Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmoderen, Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Setyaningrum, Arie. Jurnal Mandatory Politik Perlawanan: Memetakan Lokasi bagi ‘Politik Identitas’ dalam Wacana Politik Poskolonial. Yogyakarta.

- Sudarma, Momon, 2003. "Telaah terhadap Pemikiran Anthony Giddens dalam The Runway world"
- Syarif Romas, Chumaidi. 2003. Kekerasan di Kerajaan Surgawi. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Wahyudi dkk. 2015, MADURA: Masyarakat, Budaya dan Politik, Elmareta: Puskakom
- Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria. UGM. Yogyakarta.
- Wiyata, A Latif. 2002. Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, Yogyakarta: LkiS
- Zahid A, "Sensualitas Media Sosial di Era Globalisasi, Kajian Sosiologi Media McMacluhan sebagai Analisis Media Masa Kini", Jurnal Sosiologi USK Vol 13. No 1.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

